



RANCANGAN LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT, 14 – 17 DESEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

o **Dasar Kunjungan Kerja**

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat.

o **Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

o **Susunan Tim**

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	ERMA SURYANI RANIK, SH	KETUA TIM /F.P.GERINDRA
2	ARTERIA DAHLAN, S.T, S.H. MAH	ANGGOTA/F.PDIP
3	RISA MARISKA SH	ANGGOTA/F.PDIP
4	DRS. ERWIN TPL TOBING	ANGGOTA/F.PDIP
5	DRS. M. NURDIN. MM	ANGGOTA/F.PDIP
6	DRS. H. AHMAD ZACKY SIRADJ	ANGGOTA/F.PG
7	DR. SAIFUL BAHRI RURAY, SH., M.Si	ANGGOTA/F.PG
8	H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH., Mhum	ANGGOTAF.P. GERINDRA
9	DRS. WENNY WAROUW	ANGGOTAF.P. GERINDRA
10	DR. HINCA IP PANJAITAN XIII, SH., MH., ACCS	ANGGOTA/F.P.DEMOKRAT
11	Ir. H. MULYADI	ANGGOTA/F.P.DEMOKRAT
12	H. MUSLIM AYUB, S.H.,M.M.	ANGGOTA/F. PAN
13	H. BAHARUDIN NASORI, SSI., MM	ANGGOTA/F. PKB
14	H. TB. SOEMANDJAJA	ANGGOTA/F. PKS
15	H.M. AMIR USKARA, M.Kes	ANGGOTA/F. PPP
16	H.M. ALI UMRI, SH., M.Kn	ANGGOTA/F. P. NASDEM
17	SAMSUDIN SIREGAR, SH	ANGGOTA/F. P. HANURA

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat, Tenaga Ahli, TV Parlemen dan Staf Pemberitaan DPR RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Mahkamah Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM serta Penghubung dari BNN.

o **Pelaksanaan Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (Empat) hari, yaitu tanggal 14 – 17 Desember 2018.

o **Objek Kunjungan Kerja**

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tengah beserta seluruh jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya.
5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. PERTEMUAN DENGAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Pertemuan bertempat di Mapolda Jawa barat Pada tanggal 17 Desember 2018.

A. Anggaran

- Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung menyampaikan terkait tahun 2018 yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bersumber dari dana sebagai berikut ; DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (663271) setelah direvisi adalah sejumlah Rp.4.743.042.000,- (Empat Miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) yang dibagi dalam 3 (tiga) jenis Anggaran Belanja yaitu Anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp. 3.792.656.000,- Anggaran Belanja Barang sejumlah Rp. 925.386.000,- sedangkan Anggaran Belanja Modal sejumlah Rp. 25.000.000,- sedangkan DIPA Ditjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berupa belanja barang sejumlah Rp.100.680.000,- (seratus juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Adapun realisasi anggaran sampai dengan bulan November tahun 2018 realisasi anggaran Pengadilan Militer II-09 Bandung sejumlah DIPA sejumlah Rp. **3.649.288.000** ,- (Tiga Milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Anggaran Belanja Pegawai sejumlah Rp 2.824.198.761,- persen realisasi Rp.74,46 %. Anggaran Belanja Barang

sejumlah Rp. 800.274.023,- persen realisasi Rp. 86,48%. Sedangkan Anggaran Belanja Modal sejumlah Rp. 24.816.000,- persen realisasi Rp. 99,26 %. DIPA sejumlah = Rp. 91.100.000,- (Sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) persen realisasi = 90.29 %. Dengan demikian Total Realisasi Anggaran Tahun 2018 sampai dengan bulan November sejumlah adalah 83,66 %.

B. Pengawasan

- Penjelasan terkait dengan program yang menjadi skala prioritas Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2019 adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan percepatan penyelesaian perkara di kantor dan sidang keliling ke daerah di Provinsi Jawa Barat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Militer II-09 Bandung khususnya untuk sarana Teknologi Informasi, pencari keadilan mempunyai akses yang sangat luas untuk mendapatkan informasi baik tentang perkara maupun tentang hal lain yang menyangkut pelayanan Publik pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, Program Penataan dan Penguatan Organisasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga Orgas pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sama dengan lingkungan peradilan lainnya.
- Kebutuhan Anggaran 2019 dalam Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peradilan antara lain sebagai berikut;
 1. Postur anggaran pada DIPA Pengadilan Milier II-09 Bandung didominasi oleh Belanja Pegawai (51) sedangkan Belanja Barang baik Belanja Operasional maupun Non Operasional serta Belanja Modal hanya sekitar 20% saja dari total anggaran. Hal ini menyebabkan, banyak program kegiatan peningkatan kualitas pelayanan peradilan yang tidak dapat dicapai. Ke depan, diharapkan harus direncanakan anggaran yang juga memperhatikan peningkatan Belanja Barang dan Belanja Modal secara seimbang dan proporsional berdasarkan kebutuhan Satuan Kerja (*bottom up*).
 2. Kebutuhan anggaran untuk Perawatan Gedung Kantor dan Halaman, alokasi dana yang tersedia masih kurang sehingga tidak optimal dalam memperbaiki gedung kantor. Dalam anggaran tahun 2018 Pengadilan Militer mendapatkan Alokasi sejumlah Rp. 95.600.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana perhitungan angka tersebut, adalah Pemeliharaan Gedung Kantor $1200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 78.000 = \text{Rp. } 93.600.000,-$ dan Pemeliharaan Halaman $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 2.000.000,-$. Idealnya dalam SBM yang ada untuk pemeliharaan gedung kantor adalah Pemeliharaan Gedung Kantor $1200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 180.000.000,-$ kemudian Pemeliharaan Basement $600 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}$

150.000 = Rp. 90.000.000 serta Pemeliharaan Halaman 400 m² x Rp. 10.000 = Rp. 4.000.000,- Sehingga perawatan gedung yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal dikarenakan keterbatasan dana tersebut.

3. Dibutuhkan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kendaraan Dinas Kadilmil II-09 Bandung sebanyak 1 Unit seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dikarenakan kendaraan dinas Kadilmil II-09 Bandung masih menggunakan Grand Livinia Tahun 2010.
4. Dibutuhkan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kendaraan Dinas Waka Kadilmil II-09 Bandung sebanyak 1 Unit seharga Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) dikarenakan kendaraan dinas Wakadilmil II-09 Bandung masih menggunakan Kijang Innova Tahun 2006.
5. Diharapkan tambahan Belanja Modan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua untuk Kendaraan Pegawai sebanyak 5 Unit seharga @ Rp. 27.000.000,-/Unit (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan total anggaran Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dikarenakan kendaraan dinas Pegawai Dilmil II-09 Bandung masih menggunakan Supra X 125 Tahun 2008.
6. Langganan Internet sesuai dengan spesifikasi adalah 10 mb/second, akan tetapi anggaran langganan Internet untuk Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk tahun anggaran 2018 adalah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pertahun yang hanya cukup untuk 5 mb/second. Hal ini, sangat menghambat pelaksanaan tugas pokok yang pengandalkan (berbasis) TI (Teknologi Informasi).
7. Anggaran Perawatan IT sangat kurang untuk pemeliharaan situs website, aplikasi-aplikasi bahkan antivirus dan internet security juga masih sangat kurang, yang hanya cukup untuk 10 komputer idealnya untuk 20 komputer, (setengah dari jumlah komputer kantor). Anggaran untuk pengadaan anti virus hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan yang dibutuhkan untuk program ini sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
8. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 yang tidak mempunyai rumah dinas. Sehingga pengadaan Rumah Dinas sangat dibutuhkan serta dirasakan mendesak untuk segera diadakan.
9. Pegawai atau Staf Pengadilan Militer II-09 diharapkan diberikan bantuan Mess atau Rumah Murah Layah Huni sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan pegawai. Sehingga ketersediaan Mess atau Rumah Murah Layah Huni sangat dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah yang dapat memacu semangat, motivasi dan kinerja pegawai itu sendiri

untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan dan masyarakat.

- Penjelasan terkait perkara yang cukup menonjol dan menarik perhatian publik adalah perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas nama Tumpak Dolok Saribu, Pangkat Serma dengan nomor register perkara : 89K/PM-II-09/AD/VII/2018 dimana dalam perkara ini telah melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Kejadian dalam perkara ini terjadi pada tahun 2017, dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Perkara ini menarik perhatian publik karena warga setempat melakukan protes akibat dari PT. Bintang Muda Plastik Gumil membuang limbahnya ke sawah milik warga, akan tetapi protes tersebut tidak diperhatikan oleh perusahaan. Dalam proses persidangan, dibutuhkan pendapat Saksi Ahli dari Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, akan tetapi tidak dapat dihadirkan dikarenakan tidak adanya anggaran untuk menghadirkan saksi ahli.
- Penjelasan Rincian Perkara Yang Masuk dan yang tengah dan yang telah diselesaikan tingkat pertama dilaksanakan sesuai skala prioritas, dimana perkara yang terdakwa berada dalam tahanan harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya. Sesuai Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2015 dapat menyelesaikan perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berpangkat Prajurit Dua sampai dengan Kapten sebagai berikut :

1.	Perkara Kejahatan			Vol. perkara
	A	Sisa perkara Tahun 2017	=	33 perkara
	B	Perkara masuk Tahun 2018	=	154 perkara
	C	Perkara diputus Tahun 2018	=	155 perkara
	D	Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2018	=	0 perkara
	E	Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th.2018	=	1 perkara
	F	Sisa perkara yang tengah dikerjakan tahun 2018	=	31 perkara
2	Perkara Pelanggaran			
	A	Sisa perkara tahun 2017	=	- perkara
	B	Perkara masuk tahun 2018	=	41 perkara
	C	Perkara diputus tahun 2018	=	41 perkara
	D	Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2018	=	- perkara
	E	Sisa perkara tahun 2018	=	0 perkara

3		Upaya Hukum		
	A	Perkara banding tahun 2018	=	4 Perkara
	B	Perkara Kasasi tahun 2018	=	12 Perkara
	C	Perkara Grasi Tahun 2018	=	- Perkara
	D	Perkara Peninjauan Kembali tahun 2018	=	1 Perkara
	E	Perkara Perlawanan tahun 2018	=	- Perkara

- Dari data perkara kejahatan Tahun 2018 per-tanggal 6 Desember 2018 perkara kejahatan masuk Tahun 2018 sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pengadilan Militer II-09 Bandung, dapat menyelesaikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) perkara kejahatan, sehingga indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara kejahatan secara riil mencapai 83,42 %, sedangkan yang berkas yang dikembalikan ke Otmil II-09 Bandung dan atau dilimpahkan ke Pengadilan Militer lain sebanyak 1 (satu) perkara atau mencapai 0,5 %. Sisa perkara kejahatan yang belum diputus sebanyak 31 (tiga puluh enam) atau mencapai 16,57 %, perkara didominasi oleh perkara desersi yang terdakwa melarikan diri (*In Absentia*) sehingga harus ditempuh tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada tahun 2018 ini, jumlah pelanggaran yang masuk sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dan semuanya dapat diputus yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara sehingga perhitungan pencapaian penyelesaian perkara pelanggaran mencapai 100 %. Target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sebagaimana ditetapkan Program Kerja 2018 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) perkara, sementara perkara masuk sampai dengan Desember 2018 adalah 228 (dua ratus dua puluh delapan) perkara. Pencapaian kinerja penyelesaian perkara kejahatan putus Tahun Anggaran 2018 dicapai sejumlah 85,96 %, diperoleh dari total perkara masuk adalah 228 (dua ratus dua puluh delapan) perkara dan telah diputus sebanyak 196 (seratus sembilan puluh satu) perkara.
- Untuk perkara pelanggaran ditetapkan Program Kerja 2018 sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara namun dapat diputus sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara sehingga pencapaian kinerja penyelesaian perkara pelanggaran putus Tahun Anggaran 2018 dicapai sejumlah 164 %.
- Adapun sisa perkara kejahatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara merupakan perkara baru yaitu sebanyak 8 (delapan) dan perkara In Absentia sebanyak 28 (dua puluh delapan) yang akan disidangkan pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019.

- Besaran jumlah sisa perkara adalah perkara disersi, hal ini dikarenakan untuk perkara disersi mempunyai acara berperkara khusus dimana Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus melakukan panggilan kepada kesatuan 3 (tiga) kali dan 6 (enam) bulan sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung, apabila tidak hadir maka dapat diputus secara In absentia.
- Penjelasan Terkait Permasalahan Eksekusi dalam perkara Disersi yang diputus secara inabsensia, dikarenakan Terdakwa belum diketemukan oleh kesatuan sehingga belum bisa untuk dilaksanakan eksekusi. Terkait dengan waktu pelaksanaan eskesekusi meskipun memerintahkan oditur militer untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah salinan surat dikirimkan, akan tetapi tidak ada patokan batas waktu berapa lama salinan putusan itu harus diselesaikan.
- Data Perkara yang belum di eksekusi Jumlah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sampai dengan bulan November 2018 adalah sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) perkara.
- Jumlah data yang dieksekusi di Masmil hanya 80 (delapan puluh) orang dan yang belum dieksekusi sebanyak sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yang disebabkan 52 (lima puluh dua) orang perkaranya adalah perkara yang sejak semula orangnya telah melarikan diri sehingga disidangkan secara inabsentia, sedangkan 23 orang belum bisa melaksanakan eksekusi karena melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.
- Addapun Kendala pada saat Eksekusi merupakan wewenang Oditur Militer selaku eksekutor sedangkan Pengadilan Militer tidak dalam hal ini bertugas melakukan Pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan eksekusi pidana pokok di Lembaga Pemasarakatan Militer maupun pidana tambahan yang dilaksanakan oleh Komandan Satuan.

2. PERTEMUAN DENGAN KAPOLDA JAWA BARAT

Pertemuan dilakukan di Mapolda Jawa barat Pada tanggal 17 Desember 2018.

A. Anggaran

- Penjelasan terkait Realisasi Anggaran Tahun 2018 Pagu alokasi anggaran untuk jajaran Polda Jawa Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 3.739.737.846.000,- pelaksanaan anggaran sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 telah terserap sebesar Rp. 3.685.596.122.953,-. Atau 98.55%, dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai
 - a. Pagu DIPA : Rp. 2.298.843.795.000,-
 - b. Realisasi : Rp. 2.400.200.583.422,-
 - c. Prosentase : Rp. 104,41%
- Belanja Barang
 - a. Pagu DIPA : Rp. 1.266.885.951.000,-
 - b. Realisasi : Rp. 1.158.746.287.059,-
 - c. Prosentase : Rp. 91,46%
- Belanja Modal
 - a. Pagu DIPA : Rp. 174.008.100.000,-
 - b. Realisasi : Rp. 126.649.252.472,-
 - c. Prosentase : Rp. 72,78%

1. Pagu Definitif Tahun 2019

Pagu alokasi anggaran T.A. 2019 (Definitif) yang diterima Polda Jabar adalah sebesar Rp. 3.502.260.019.000,-

- Anggaran per Belanja anantara lain:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 2.167.158.128.000,-
 - b. Belanja Barang Rp. 1.245.335.106.000,-
 - c. Belanja Modal Rp. 89.766.785.000,-
- Anggaran per Program antara lain :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Polri sebesar Rp. 1.998.461.808.000,-
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri sebesar Rp. 433.901.473.000,-
 - c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri sebesar Rp. 18.778.754.000,-
 - d. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polisi sebesar Rp. 36.332.838.000,-
 - e. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri sebesar Rp. 30.049.569.000,-
 - f. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 74.646.899.00,-
 - g. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 91.100.000,-
 - h. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan sebesar Rp. 88.978.649.000,-
 - i. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 548.605.944.000,-
 - j. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pindana sebesar Rp. 153.550.077.000,-

- k. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi Rp. 117.165.739.000,-
 - l. Program Pengembangan Hukum Kepolisian sebesar Rp. 1.688.169.000,-
2. Alokasi Anggaran Program Prioritas Nasional di Polda Jabar pada Pagu T.A. 2019
- Pagu alokasi anggaran T.A. 2019 (Definitif) yang diterima Polda Jabar adalah sebesar Rp. 3.502.260.019.000,- adalah Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri, pada kegiatan Pelatihan Petugas RPK sebesar Rp. 46.125.000,- Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban, pada kegiatan MoU Integrasi CCTV Pemda dengan Command Centre Polri Rp. 4.875.000,- Program pemberdayaan potensi keamanan, pada kegiatan jumlah problem solving (pemecahan masalah) Rp. 673.500.000,- Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pada kegiatan:
 - a. pengaturan, pengawalan, dan patrol (pengamanan aksi unjuk rasa) Rp. 21.030.048.000,-
 - b. kegiatan pengamanan pemilu 2019 rp. 149.403.552.000,-
 - Program Penindakan tindak pidana umum, pada kegiatan :
 - a. Penyelesaian kasus tindak pidana umum sebesar Rp. 22.249.681.000,-
 - b. Pemeriksaan visum luar sebesar Rp. 13.800.000,-
 - c. Pemeriksaan visum dalam sebesar Rp. 10.000.000,-
 - d. Penyelesaian kasus tindak pidana narkoba (PN) Rp. 10.622.143.000,-
 - e. Penyelesaian tindak pidana korupsi (PN) Rp. 5.600.000.000,-
3. Rencana strategis dan program yang menjadi skala prioritas di tahun 2019.
- Sasaran strategis Polda Jabar
 - a. Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepolisian
 - b. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbesa dari gangguan kambutbmas
 - c. Terwujudnya penegakan hukum
 - d. Terwujudnya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas
 - e. Terwujudnya kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat
 - f. Terwujudnya personil Polri yang professional, bermoral, dan modern
 - g. Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan.

B. Pengawasan

- Data-data jenis kriminalitas dan/tindak pidana yang paling banyak atau rentan terjadi yang ditangani oleh Polda Jabar, kasus menonjol dan menarik perhatian masyarakat serta perkara yang sedang ditangani.
- Tindak pidana yang paling banyak terjadi untuk tahun 2018 adalah kasus curat, curas, curanmor, untuk curat sebanyak 1321 kasus selesai 129 kasus kemampuan penyelesaian 79%, curas sebanyak 313 kasus selesai 396 kasus kemampuan penyelesaian 127% dan curanmor 2421 kasus selesai 1051 kasus, kemampuan penyelesaian 59%.
- Perkembangan penyelesaian kasus menonjol selama tahun 2018:
 - a. Pencurian dengan kekerasan
 - b. TPPO
 - c. Pengeroyokan
 - d. Pembunuhan
 - e. Perlindungan anak
 - f. Penganiayaan
 - g. Penyalahgunaan senjata api
 - h. Percobaan pembunuhan
 - i. Pengibaran dan pembakaran bendera HTI
 - j. Kejahatan terhadap ketertiban umum
- Tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Jabar dan Perkembangan serta hambatan dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang ada, ditahun 2018 Polda Jawa Barat beserta jajaran telah dapat menyelesaikan sebanyak 46 perkara korupsi dari 62 perkara yang ditangani dengan prosentase 74,19% dengan nilai kerugian Negara suluruhnya sebesar Rp. 28.927.240.775,- dan berhasil diselamatkan sebanyak Rp. 6.485.340.725,-.
- Adapun hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selain berasal dari dalam berupa terbatasnya jumlah penyidik dan penyidik tindak pidana korupsi pada polda Jabar dan Jajaran, juga berasal dari eksternal Polda Jabar yaitu terkait dengan lamanya waktu yang digunakan oleh auditor seperti BPK, BPKP DAN inspektorat dalam melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian Negara.
- Strategi dan langkah-langkah Polda Jabar dalam rangka penciptaan ketertiban dan keamanan masyarakat terkait persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru serta Pemilu Serentak Tahun 2019

a. Tindakan Pre-emitif

Dalam tindakan pre-emitif, Polda Jabar melakukan upaya cipta Kondisi baik kedalam Polri maupun keluar yaitu dengan instansi terkait dan elemen masyarakat.

b. Tindakan Preventif

- Melakukan rapat kordinasi antar lintas sektoral
- Melaksanakan latihan pra operasi
- Menggelar kekuatan dengan gelar pasukan
- Melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan
- Melakukan kegiatan patroli gabungan skala besar setiap akhir pekan dan hari libur serta antisipasi ancaman pada moment kegiatan masyarakat
- Menyelenggarakan serta memotivasi diselenggarakannya deklarasi anti HOAX dan deklarasi pemilu dengan instansi terkait serta elemen masyarakat baik kelompok maupun perorangan.
- Peningkatan peran satgas terorisme, satgas nusantara dan satgas cyber
- Patrol cyber
- Penjagaan lokasi rawan gangguan dan kejahatan baik secara terbuka maupun tertutup
- Optimalkan satuan penanggulangan massa baik brimob maupun dalmas serta satgas tripatra
- Melakukan pengamanan terhadap capres dan cawapres serta kegiatan perayaan natal dan tahun baru.
- Menyiapkan rencana kontijensi dengan pengamanan system reyonisasi

c. Tindakan penegakkan hukum :

- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana konvensional dan transnasional
 - Penyelidikan dan penyidikan para pelaku penyebar berita bohong (hoax) black campaign serta negative campaign
 - Koordinasi bawaslu dan kejaksaan dalam penanganan terpadu pelanggaran dan tindak pidana pemilu.
- Penjelasan terkait Langkah-langkah Kapolda Jabar dalam menyikapi kemandirian dan profesionalisme Kepolisian di Polda Jabar
 - Mendapatkan personil Polri yang berkualitas
 - Dibekali juga ilmu komunikasi social, teknologi informatika yang sesuai dengan perkembangan jaman disamping ilmu kepolisian.

- Reward and punishment
- SIM online, SIM keliling, SIM outlet
- SKCK Online, SKCK keliling
- Langkah-langkah Kapolda Jabar untuk menjamin bahwa seluruh jajaran kepolisian daerah Jawa Barat yang bertugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Langkah Kapolda Jabar dalam upaya menjamin terlaksananya tugas pokok diseluruh jajaran yang sesuai dengan harapan masyarakat, disamping melakukan kunjungan kerja secara rutin, juga mengoptimalkan peran fungsi pengawasan yaitu itwasda dan fungsi Paminal dengan mengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan dan Pemeriksaan satuan kerja
 - Verifikasi terhadap kegiatan serah terima jabatan
 - Pengaduan masyarakat
 - Pengawasan operasi
 - Melakukan operasi bersih, penegakkan dan penertiban disiplin secara rutin
- Penjelasan Kapolda terkait Rasio ideal personil Kepolisian yang dibutuhkan untuk wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dengan memperhatikan kondisi geografi yang sangat luas dan demografi yang cukup tinggi serta gangguan kamtibmas khususnya tindak pidana dalam setahun rata-rata 16 ribu kasus atau per hari rata-rata 44 kasus , maka minimal rasio kepolisian untuk Polda Jabar 1: 700 dan mayoritas anggota bertugas di fungsi operasional.
- Data Penanganan aparat yang terlibat narkoba khususnya anggota Polri, untuk tahun 2018 sebanyak 19 orang dengan rincian penanganan 16 orang diproses Pengadilan Negeri dan 3 orang diserahkan kepada Anaknya.
- Data penanganan aparat yang menyimpang, baik melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum lainnya adalah Untuk pelanggaran disiplin mengalami kenaikan 27 kasus atau naik 6% dan tindak pidana turun 14 kasus atau turun 54%.

3. PERTEMUAN DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Pertemuan dilakukan di Mapolda Jawa barat Pada tanggal 17 Desember 2018.

A. Anggaran

Sampai dengan bulan 12 Desember 2018 pencapaian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan peradilan dibawahnya sudah mencapai realisasi sebesar 94,24% atau sebesar Rp. 197.280.284.502,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 206.484.459.000,-.

- Alokasi Anggaran 2019
 - a. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)
Alokasi anggaran DIPA 01 TA 2019 sebesar Rp. 205.602.539.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 178.987.168.000,-
 - Belanja barang operasional Rp. 23.632.397.000,-
 - Belanja barang non operasional Rp. 254.440.000,-
 - b. DIPA Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 2.959.624.000,-
 - c. Program Prioritas
 - Peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp. 1.389.600.000,-
 - Program peningkatan manajemen peradilan agama.
 - d. Kebutuhan Anggaran yang masih diperlukan
 - Pembangunan sarana gedung kantor
 - Pengadaan tanah gedung kantor
 - Rumah dinas pimpinan dan hakim
 - Sarana dan prasarana satker baru
 - Biaya operasional APM (Akreditasi Penjamin Mutu)

B. Pengawasan

- Penjelasan terkait perkara yang menonjol dari bulan Januari s/d bulan November 2018 antara lain Cerai Gugat, Cerai Talak, Isbat Nikah, Dispensasi Kawin, Penetapan Ahli Waris, Harta Bersama, Perwalian, Izin Poligami.
- Objek pembinaan dan pengawasan antara lain Manajemen Peradilan, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, SIPP dan Kinerja Pelayanan Publik.
- Terkait Sasaran dan Tindak Lanjut dalam pengawasan non regular berupa sidak dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya tentang disiplin waktu dan disiplin kerja pegawai. Serta Pengawasan online melalui aplikasi penunjang kinerja.

4. PERTEMUAN DENGAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAWA BARAT

Pertemuan dilakukan di Mapolda Jawa barat Pada tanggal 17 Desember 2018.

A. Anggaran

- Penjelasan terkait realisasi anggaran tahun 2018, Pagu:Rp. 310.988.396.000,- sedangkan Realisasi sebesar Rp. 247. 338.922.431,- Sisa berjumlah Rp. 63. 649.473.569,-

- Realisasi DIPA badan urusan administrasi tahun 2018 pengadilan tinggi bandung dan pengadilan negeri seluruh jawa barat (per 30 november 2018).
- Dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :
 - Belanja Pegawai : Rp. 172.529.787.514,- (85,05%)
 - Belanja Barang : Rp. 21.262.739.754,- (10,48%)
 - Belanja Modal : Rp. 9.070.876.244,- (4,47%)
 - Jumlah : Rp. 202.863.403.515,- (87,05%)

B. Pengawasan

- Pengadilan Tinggi Jawa barat telah melaksanakan pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui program sertifikasi hakim dan pelatihan, Penunjukan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SK Penunjukan Tim Audit Akreditasi Penjaminan Mutu, implementasi perma No.3 Tahun 2018.
- Agen perubahan sudah ditetapkan melalui SK KPT Jawa Barat Tentang Penunjukan Role Model Pengembangan Prilaku Budaya Kerja dilingkungan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tahun 2018, Nomor W11.U/94/KP.03/1/2018 , SK KPT Jawa Barat Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja.
- Seluruh Jajaran pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari Seluruh jajaran diakomodasikan dalam keputusan Rapat Pembangunan Zona Integritas (ZI)

6. PERTEMUAN DENGAN KAKANWIL KUMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI JAWA BARAT

Pertemuan dilakukan di Mapolda Jawa barat Pada tanggal 17 Desember 2018.

A. Anggaran

- Pada tahun 2018 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar mendapatkan anggaran sebesar Rp. 503.872.460.000,- sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 penyerapan anggaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar mencapai Rp. 473.087.660.363,-
- Pagu definitif anggaran tahun 2019. Pada tahun anggaran, berdasarkan alokasi anggaran yang telah diterima kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAMJabar mendapatkan pagu sejumlah Rp. 563.432.415.000,-. Jumlah ini meningkat sejumlah Rp. 59.559.955.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 11,82% dari total pagu yang diterima pada tahun anggaran 2018.

- Program Prioritas Tahun 2019, Pembangunan Rutan Perempuan Bandung dan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Bogor.

B. Pengawasan

- Terus menerus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah maupun DPRD tentang keberadaan dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan di kantor wilayah
 - a. Melakukan mediasi dan menerima konsultasi mengenai permasalahan pembentukan produk hukum di daerah
 - b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
- Terkait masalah over kapasitas di Lapas:
 - a. Data-data tentang kondisi fisik bangunan sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rutan di provinsi Jawa Barat dan data untuk mendapatkan rasio ideal kapasitas LP dan jumlah petugas LP, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan.
 - b. Data mengenai pencairan Biaya Makanan (BAMA) dan pemenuhan standar yang dtenggarai seringkali terlambat atau mengalami kendala.
- Terkait pengawasan terhadap orang asing:
 - a. Pengawasan Administratif
Yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pada saat pemberian dan perpanjangan izin tinggal untuk menghindari penyimpangan atas aturan yang telah ditetapkan.
 - b. Pengawasan Lapangan
pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatannya telah sesuai dengan izin yang diberikan
 - c. Penggunaan aplikasi pelaporan orang asing oleh hotel, penginapan, apartemen, mess perusahaan ataupun perorangan.

7. PERTEMUAN DENGAN BNN PROVINSI JAWA BARAT

Pertemuan dilakukan di Mapolda Jawa barat Pada tanggal 17 Desember 2018.

A. Anggaran

- Pada tahun 2018 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar mendapatkan anggaran sebesar Rp. 503.872.460.000,- sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 penyerapan anggaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HA.
- Pagu Anggaran BNN se Jawa Barat tahun 2019
 - a. Belanja Rutin pegawai : Rp. 10.330.441.000,- (gaji)

- b. Belanja Barang/Kegiatan Teknis : Rp. 31.756.455.000,- (OPS)
 - c. Belanja Modal : Rp. 51.800.000,-
 - d. Total : Rp. 42.138.696.000,-
- Terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 1.817.616.000,- atau sebesar 4,14%
 - Penjelasan terkait dengan Kinerja BNN Jawa barat.
 - Meningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi di lembaga instansi pemerintah dan komponen masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi instansi pemerintahan dan komponen masyarakat agar sesuai dengan standar layanan rehabilitasi berdasarkan peraturan BNN no 24 thn 2017 sehingga outcome rehabilitasi pulih, produktif, dan berfungsi social tercapai.
 - Kerjasama dengan DIKTI
 - Kerjasama dengan Desa
 - Kerjasama dengan Komponen Masyarakat
 - Kordinasi dengan BNN pusat dalam P4GN
 - Kordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya dalam P4GN

SATKER	BENTUK HIBAH	ANGGARAN	KET
BNNP JABAR	UANG	27.245.186.000	
BNNK BOGOR	UANG	1.000.000.000	
BNNK CIANJUR	UANG	100.000.000	
BNNK KERAWANG	UANG	200.000.000	
BNNK BANDUNG BARAT	UANG	1.000.000.000	
BNNK TASIKMALAYA	UANG	300.000.000	
BNNK SUMEDANG	UANG	50.000.000	
JUMLAH		29.895.186.000	

III. Sesi Tanya Jawab dan Pendalam Anggota Komisi III DPR RI

- Komisi III mengapresiasi kinerja mitra dan mengartikan kepada kakanwil kemenkumham kejadian lapas sukamiskin tidak terjadi lagi, komisi III juga mengapresiasi kinerja kajati terhadap guru, dan kepada kapolda terobosan terhadap SKCK sangat baik untuk masalah anggaran ditahun berikutnya diusahakan penyerapan anggaran bisa 100%
- Masalah narkoba merupakan extra ordinary crime dan indonesia saat ini darurat narkoba mohon untuk ini menjadi perhatian khusus bagi BNN dan Kapolda Jabar, apakah sdm ataupun alat yang dimiliki penegak hukum memadai untuk mengatasi kasus narkoba karena saat ini juga ditemukan narkoba dalam bentuk vape jangan sampai narkoba dalam bentuk baru tidak bisa dideteksi oleh penegak hukum dan mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.
- Jenis-jenis dari tindak pidana korupsi apa yang banyak dilakukan juga seberapa besar jumlah yang telah diselamatkan dari hasil tindak pidana

korupsi dan kasus besar apa yang sedang ditangani juga tindakan apa yang bisa memberikan shock therapy terhadap tindak pidana extra ordinary crime

- Upaya pengamanan apa yang dilakukan polda jabar menjelang pemilu di seluruh wilayah Jabar.
- Untuk penanganan kasus-kasus diharapkan seluruh penegak hukum Jawa Barat tidak terbang pilih, ruang sidang yang memadai juga diperlukan untuk pengadilan yang kurang sumber daya
- Bagaimana mengenai tingkat hunian yang sampai 140% lebih di dalam lapas, bukankah ini over kapasitas dan berbahaya.
- Untuk pengadilan, jaksa ataupun hakim dan polda diharapkan tidak perlu khawatir ataupun takut dalam melakukan tugas sekalipun yang diadili merupakan pejabat tinggi.

IV. Jawaban Mitra

- Kaitan dengan masalah rehabilitas dimaksimalkan dan upaya lain yang BNN lakukan adalah bekerja sama dengan lembaga desa untuk menjangkau masyarakat sampai ke RT selain itu juga bekerjasama dengan lapas untuk menjamin tidak adanya peredaran ataupun narkoba dalam lapas, juga bekerjasama dengan Polda dan beradu prestasi dalam menangani kasus narkoba dan hal ini merupakan suatu yang membanggakan.
- Untuk perlatan guna menangani kasus narkoba polda sudah cukup namun ruang pendidikan masih kurang karena jumlah kriminalitas yang tinggi mencapai lebih dari 60% sehingga pendidikan personil untuk memberantas tindak kriminal saat ini sangat diperlukan, kemudian untuk kasus korupsi telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 54 milyar dan hukuman yang diberikan sesuai dengan undang-undang.
- Kami tidak bisa secara optimal mengendalikan over kapasitas lapas karena kami sebagai penyangga kota dan kami menerima distribusi juga dari lapas yang berada di jakarta ketika di wilayah tersebut juga mengalami over kapasitas.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI